

## Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Sumatera Barat

Aditya Nugraha Alius<sup>1</sup>, Ali Anis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [adityableh@gmail.com](mailto:adityableh@gmail.com), [alianis2911@yahoo.com](mailto:alianis2911@yahoo.com)

### Info Artikel

#### Diterima:

10 Januari 2024

#### Disetujui:

25 Januari 2024

#### Terbit daring:

02 Februari 2024

#### DOI: -

### Sitasi:

Alius, A N & Anis, Ali (2024).  
Pengaruh Pembangunan  
Infrastruktur Ekonomi  
Terhadap Pertumbuhan  
Ekonomi Inklusif Di Sumatera  
Barat

### Abstract:

*This research aims to determine the influence of economic infrastructure on inclusive economic growth in West Sumatra from 2014 to 2021. This type of research is quantitative. The object of this research was carried out in all regencies/cities in West Sumatra for the period 2014 to 2021. The type of data used was secondary data that researchers obtained from the West Sumatra Central Bureau of Statistics (BPS). The data analysis method used is panel data regression analysis, with the Chow test, Hausman test and hypothesis test ( $R^2$  test,  $F$  test and  $t$  test), the panel data regression estimation model used is the Fixed Effect Model, data processing uses the E-program Views 12. The results of this research show that together the infrastructure variables electricity, water, roads and communication technology have a significant effect on the level of inclusive economic growth in West Sumatra. Partially: (1) electricity infrastructure has a positive but not significant effect on the level of inclusive economic growth. (2) water infrastructure has a positive and significant effect on the level of inclusive economic growth. (3) road infrastructure has an insignificant positive effect on the level of inclusive economic growth. (4) communications technology infrastructure has a positive and significant effect on the level of inclusive economic growth.*

**Keywords:** water, roads, electricity, inclusive economic growth, communication technology

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat dari rentang tahun 2014 s/d 2021. Jenis penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode tahun 2014 s/d 2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, dengan uji chow, uji hausman dan uji hipotesis (uji  $R^2$ , uji  $F$ , dan uji  $t$ ), model estimasi regresi data panel yang digunakan yaitu Fixed Effect Model, pengolahan data menggunakan program E-Views 12. Hasil penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama variabel infrastruktur listrik, air, jalan dan teknologi komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat. Secara parsial: (1) infrastruktur listrik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. (2) infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. (3) infrastruktur jalan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. (4) infrastruktur teknologi komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif.

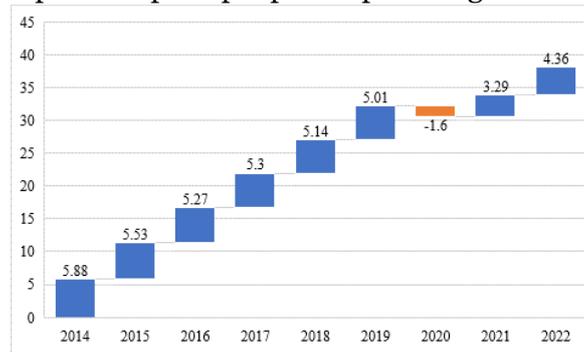
**Kata Kunci:** air, jalan, listrik, pertumbuhan ekonomi inklusif teknologi komunikasi

Kode Klasifikasi JEL: O40, L95, L96

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menetapkan bahwa: “Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat”. Oleh karena itu, menjadi

tugas pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Provinsi Sumatera Barat terus berupaya memanfaatkan potensi perekonomian daerah yang beragam. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memungkinkan para pelaku ekonomi terlibat dan mengambil peran sebagai penggerak ekonomi, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Meningkatkan kesejahteraan dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan strategi yang tepat agar dapat menghasilkan pemerataan dan kemajuan. Mendorong pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat proses pembangunan nasional dan daerah.



Perluasan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi disebut pertumbuhan ekonomi. Sukirno mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang meningkatkan kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat dan sebagai hasilnya meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut (Yuliani, 2019).

Gagasan pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi terkini. Menurut Bappenas dalam Safitri dkk. (2021), pertumbuhan inklusif adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan akses yang adil terhadap berbagai peluang bagi semua orang, mengurangi kesenjangan regional dan kelompok, serta meningkatkan kesejahteraan.

Gagasan pertumbuhan inklusif berevolusi dari gagasan Pro Poor Growth yang pertama kali digunakan sebagai strategi pembangunan di negara-negara terbelakang (Ali dalam Prabandari, 2018). Gagasan pertumbuhan inklusif mempunyai jangkauan yang lebih rumit jika gagasan Pertumbuhan Pro Miskin menekankan pertumbuhan yang dapat lebih membantu masyarakat miskin.

Pembangunan ekonomi inklusif, menurut Prasetyantoko dkk (2012), adalah pembangunan untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan dan latar belakang mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Ali dan Zhuang (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin kemungkinan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, selain menghasilkan peluang ekonomi baru. Pertumbuhan dikatakan inklusif jika memunculkan fungsi peluang sosial yang ditentukan oleh dua hal: (i) rata-rata jumlah peluang yang dimiliki masyarakat, dan (ii) sebaran peluang tersebut dalam masyarakat.

Infrastruktur merupakan salah satu persyaratan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Prasarana dijelaskan secara linguistik sebagai sarana dan prasarana umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fasilitas umum mencakup hal-hal seperti listrik, air, jalan, dan sebagainya. Selain itu, infrastruktur merupakan salah satu jenis modal publik dalam perekonomian yang dihasilkan dari investasi pemerintah (Mankiw dalam Anggraini dkk, 2021).

Model pertumbuhan ekonomi yang baru menggabungkan infrastruktur, yang berkontribusi terhadap produktivitas yang lebih tinggi. Produksi suatu negara didasarkan

pada aksesnya terhadap pelabuhan, jalan, jembatan, bendungan, dan modal lainnya (Fikriah dan Wulandari, 2015). Pemerintah menguraikan berbagai jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Jenis infrastruktur tersebut antara lain infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur transportasi minyak dan gas bumi. Infrastruktur yang diuraikan di atas termasuk dalam kategori infrastruktur dasar karena dibutuhkan oleh masyarakat luas dan harus diatur oleh pemerintah daerah (Panorama et al., 2019).

Infrastruktur listrik merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik dan dipergunakan sebagai salah satu sarana penggerak ekonomi. Setiap tahunnya PLN sebagai penyedia energi listrik di Indonesia melaporkan bahwa produksi listrik dari tahun ke tahun terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia yang kian harus terus meningkat pula, begitu juga dengan di Sumatera Barat.

Sulit untuk membantah fakta bahwa energi listrik sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat saat ini. Salah satu penyumbang signifikan bagi kemajuan peradaban kontemporer adalah sektor ketenagalistrikan. Saat ini terdapat empat kategori pengguna energi listrik, dan listrik menjadi salah satu kebutuhan pokoknya. Menurut Damara dkk. (2019), kategori pengguna ini meliputi kelompok rumah tangga, industri, bisnis, dan umum. Saat ini, akses terhadap energi telah menjadi hal yang penting dalam kehidupan modern. Bahkan ketika terjadi pemadaman listrik sementara, kita sering menyaksikan dan mendengar keluhan yang terus menerus. Poin kuncinya adalah umat manusia tidak akan maju ke tingkat peradaban ini jika bukan karena sektor kelistrikan.

Listrik menjadi kebutuhan utama yang harus tersedia ketika suatu daerah berkembang, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi kegiatan perekonomian khususnya industri. Meningkatnya jumlah perlengkapan tempat kerja, peralatan rumah tangga, dan acara komunitas di masyarakat yang lebih maju secara teknologi saat ini bergantung pada listrik sebagai sumber energi (Nuritasari, 2013).

Infrastruktur air merupakan jaringan suplai air untuk air minum, penyimpanan air, dan sebagainya, mencakup pompa, pipa, pemurnian air, alat ukur, dan bangunan yang menyimpan fasilitas tersebut. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih, pemerintah melalui PDAM telah berkomitmen untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memenuhi konsumsi air bersih. Ketersediaan air bersih merupakan salah satu aspek krusial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Tersedianya fasilitas air bersih bagi masyarakat dapat membantu masyarakat lebih produktif dan aktivitas perekonomian akan berjalan lancar.

Salah satu kebutuhan penting manusia yang tidak dapat dipisahkan adalah air bersih. Adapun menurut Gusmanandri (2013), ayat 3 pasal 33 UUD 1945 menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Selain itu, hal ini dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Sumber Daya Air yang menyatakan: "Setiap orang berhak memperoleh air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan, kebersihan, dan produktivitas".

Karena air sangat penting bagi kehidupan manusia, maka memperolehnya harus menjadi prioritas utama pertumbuhan. Tiga kategori yang mewakili sebagian besar penggunaan air tergantung pada sektor kegiatan: industri, irigasi untuk pertanian, dan kebutuhan rumah tangga. Guna mendongkrak produksi dan kelancaran operasi perekonomian di Sumbar, penyediaan air bersih akan membantu berbagai kegiatan perekonomian di daerah tersebut.

Sarana yang digunakan untuk transportasi darat yang menghubungkan dua lokasi disebut jalan. Oleh karena itu, agar peradaban dapat maju di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, jalan juga menjadi hal yang penting. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “jalan” adalah prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh ruas jalan, serta bangunan penunjang dan kendaraan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan/atau permukaan air, di atas permukaan tanah. , atau pada jalur kereta api, jalan truk, dan jalan kabel sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 1.

Sebagai infrastruktur transportasi, jalan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kebutuhan modal tambahan, sehingga meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dan memburuk akan menghambat distribusi input manufaktur, produk dan jasa, pertumbuhan industri, dan sumber daya, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Jalan diperlukan untuk kelancaran aliran komponen produksi dan pemasaran produk dalam pembangunan pertanian dan perekonomian pedesaan pada umumnya (Nuritasari, 2013).

Kepemimpinan yang baik merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam rangka mendorong pembangunan suatu daerah. Selain itu, tujuan perjalanan tersebut adalah untuk memperkuat mobilitas barang dan orang antara kota dengan kawasan industri dan perdagangan, pertanian dan perikanan, serta daerah pedalaman. Jalan juga mempunyai tujuan untuk menonjolkan peran kota atau provinsi sebagai pusat pembangunan dan mendorong perkembangan kota serta daerah sekitarnya (hinterland) (Sjafrizal dalam Winanda dkk, 2016).

Infrastruktur teknologi komunikasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Melalui fasilitas teknologi dan komunikasi yang telah dibangun oleh pemerintah memungkinkan masyarakat dapat bertukar informasi, baik informasi pribadi maupun informasi yang dapat menunjang aktivitas ekonomi. Pemerintah telah berkomitmen untuk terus memfasilitasi agar masyarakat mendapatkan akses komunikasi dan informasi yang lancar demi menunjang aktivitas ekonomi dengan memastikan masyarakat telah dapat mengakses internet.

Dalam bahasa Inggris, teknologi informasi dan komunikasi biasa disebut dengan ICT. Semua teknologi yang berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, dan tampilan informasi umumnya dianggap sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi (Kaaendung et al., 2021).

Sentuhan, penciuman, pengecap, pendengaran, dan penglihatan merupakan lima indera manusia yang kini sudah termasuk dalam teknologi komunikasi. Bahkan teknologi komunikasi mempunyai kemampuan untuk mengangkut seseorang melewati hambatan ruang dan waktu serta memberikan mereka akses terhadap pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia. Teknologi media telah memungkinkan manusia melihat dunia melalui jendela dan mengetahui peristiwa yang terjadi jauh tanpa harus berada di sana secara fisik..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data panel 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011-2020. Data ini diperoleh dari website lembaga resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut persamaan model regresinya antara lain:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Dimana Y merupakan Variabel terikat (Pertumbuhan ekonomi inklusif),  $\alpha$  adalah Konstanta,  $\beta_1$  adalah Koefisien Regresi Infrastruktur listrik,  $\beta_2$  adalah Koefisien Regresi Infrastruktur

air,  $\beta_3$  adalah Koefisien Regresi Infrastruktur jalan,  $\beta_4$  adalah Infrastruktur teknologi komunikasi,  $X_1$  adalah Infrastruktur listrik,  $X_2$  adalah Infrastruktur air,  $X_3$  adalah Infrastruktur jalan,  $X_4$  adalah Infrastruktur teknologi komunikasi, dan  $\varepsilon$  adalah Variabel pengganggu.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif merupakan pertumbuhan yang dapat menjamin pemerataan akses pertumbuhan, tidak diskriminatif, serta mampu meminimalkan kesenjangan antar kelompok yang di dapat dari pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan diukur dalam satuan persen. Infrastruktur Listrik dilihat dari fasilitas listrik yang dibangun oleh pemerintah yang menghasilkan energi sehingga dapat disalurkan melalui penghantar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Aspek infrastruktur listrik yang dikaji dalam penelitian ini adalah jumlah pelanggan listrik PLN di Sumatera Barat sebagai Perusahaan penyedia energi listrik yang di hitung dengan satuan banyak . Infrastruktur Air dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa distribusi air bersih yang dikelola oleh PDAM dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat kabupaten/kota provinsi meningkatkan kualitas hidup dengan berupaya meningkatkan tingkat kesehatan, sehingga penting untuk mencukupi kebutuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Infrastruktur air yang dimaksud disini adalah pada aspek banyaknya konsumsi air bersih oleh pelanggan PDAM yang dihitung dengan besaran  $m^3$  atau meter kubik. Infrastruktur Jalan dilihat dari fasilitas prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Infrastruktur jalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kondisi jalan dan panjang jalan yang telah dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat yang dinyatakan dalam satuan Km. Infrastruktur Teknologi Komunikasi mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan instrumen untuk menangani dan memindahkan data antar perangkat. Fasilitas teknologi komunikasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang telah mengakses internet di Sumatera Barat dan di ukur dalam satuan persen. Data jumlah masyarakat yang telah mengakses internet didapatkan dari BPS tahun 2014-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan model dalam regresi panel maka diperoleh hasil terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, pada asumsi klasik uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas tidak terdapat masalah. Dalam hasil penelitian ini dapat ditentukan besar pengaruh infrastruktur listrik, infrastruktur jalan, infrastruktur air, infrastruktur teknologi informasi sebagai variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai variabel terikat.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.292816	0.128128	10.09001	0.0000
X1	0.021534	0.011783	1.827489	0.0701
X2	0.002350	0.000611	3.848455	0.0002
X3	0.017270	0.012942	1.334456	0.1845
X4	0.008375	0.002373	3.528504	0.0006

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews12, 2023

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

Berdasarkan persamaan di atas, besarnya konstanta yaitu 1.29. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (infrastruktur listrik, air, jalan, teknologi komunikasi) bernilai 0, maka tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif adalah 1.29%. Uji R-square ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi dengan *Fixed Effect Model*, diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0.521. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu infrastruktur listrik, air, jalan, teknologi komunikasi sebesar 52.1% sedangkan sisanya 47.9% dijelaskan oleh karakteristik yang tidak termasuk dalam penelitian. Nilai R-squared penelitian yang hampir nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terkendala. Hal ini disebabkan karena model kajian yang digunakan hanya mencakup dua variabel, yaitu variabel infrastruktur teknologi komunikasi dan besarnya pertumbuhan ekonomi inklusif, yang mempunyai dampak cukup besar satu sama lain.

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh hasil analisis uji t pada infrastruktur listrik yang menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1.827 dan nilai signifikansi sebesar  $0.07 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. Artinya infrastruktur listrik memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif bagi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan setiap peningkatan satu satuan infrastruktur listrik akan diikuti oleh peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif 0.021534 satuan. Demikian sebaliknya, penurunan infrastruktur listrik dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif (Brilyawan dan Santosa, 2021).

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil analisis uji t pada infrastruktur air yang menunjukkan nilai t-statistik sebesar 3.848 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  maka hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. Artinya infrastruktur air memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif bagi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan setiap peningkatan satu satuan infrastruktur air akan diikuti oleh peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif 0.002 satuan. Demikian sebaliknya, penurunan infrastruktur air dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmudi dkk (2018) antara tahun 2011 dan 2015, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh infrastruktur, yaitu di bidang jalan, air, dan pendidikan. Hal ini berarti pemerintah harus memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial karena infrastruktur tersebut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil analisis uji t pada infrastruktur jalan yang menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1.334 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.184 > 0.05$  maka hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. Artinya infrastruktur jalan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif bagi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan setiap peningkatan satu satuan infrastruktur jalan akan diikuti oleh peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif 0.017 satuan. Demikian sebaliknya, penurunan infrastruktur jalan dapat menurunkan tingkat pemerataan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota

di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai infrastruktur transportasi, jalan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kebutuhan modal tambahan, sehingga meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dan memburuk akan menghambat distribusi input manufaktur, produk dan jasa, pertumbuhan industri, dan sumber daya, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Jalan diperlukan dalam pertumbuhan pertanian dan perekonomian pedesaan secara umum untuk pergerakan komponen produksi dan pemasaran produk yang efisien (Nuritasari, 2013). Kesimpulannya, mengingat perannya yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memberikan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan memerlukan perhatian terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat serta kualitas pelayanan jalan yang diberikan kepada pelanggannya.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil analisis uji t pada infrastruktur teknologi komunikasi yang menunjukkan nilai t-statistik sebesar 3.528 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0,05$  maka hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. Artinya infrastruktur teknologi komunikasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif bagi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan setiap peningkatan satu satuan infrastruktur teknologi komunikasi akan diikuti oleh peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif 0.008 satuan. Demikian sebaliknya, penurunan infrastruktur teknologi komunikasi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian Regresi Panel Fixed Effect Model dan pembahasan temuan penelitian mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Infrastruktur listrik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur listrik berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur air berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Infrastruktur jalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur jalan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Infrastruktur teknologi komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur teknologi komunikasi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **REFERENSI**

Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications* (No. 97). ERD working paper series.

- Anggraini, W., Istiqomah, I., Widayaningsih, N., & Purnomo, S. D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Fisik Terhadap Output Sektor Industri Pengolahan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(1).
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1).
- Damara, D. B. O., & Yasa, I. N. M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan energi listrik di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(1), 211-238.
- Fikriah, F., & Wulandari, M. (2015). Analisis pengaruh investasi infrastruktur publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(1), 14-29.
- Gusmanandri, A. S. Analisis dampak pembangunan infrastruktur air bersih terhadap pendapatan rumah tangga: Kasus Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Nuritasari, F. (2013). Pengaruh infrastruktur, PMDN dan PMA terhadap produk domestik bruto di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Panorama, M., Litriani, E., & Kurniasih, L. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan Tahun 2010-2014. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(1), 90-101.
- Prabandari, D. A. N., & Santoso, D. B. (2018). Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(1).
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia. *Jakarta: LP3ES: Prakarsa*.
- Rusmusi, I. M. P., & Handayani, D. R. (2018). Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan, Air, dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(3).
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif jawa timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.
- Winanda, B. R., Ophiyandri, T., & Prihantony, D. I. (2016, October). ACE 3-011 Persepsi Owner Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Jalan Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat. In *Prosiding Seminar ACE* (Vol. 22, p. 23).
- Yuliani, I. (2019). *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Uwais Inspirasi Indonesia.